

Beropini dengan Cerdas dan Bernas

Indonesia menjadi anggota penuh BRICS

Gebrakan politik luar negeri Indonesia era Prabowo yang belum genap berusia 100 hari.

Kekuatan yang menghalangi negara berkembang

Ada upaya melanggengkan struktur ekonomi-politik imperialis yang menghasilkan ketidakadilan global.

Prinsip PLN RI era Prabowo

"Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak."



BRICS: Resiliensi Politik Luar Negeri Indonesia Era Prabowo

DOI: 10.5281/zenodo.14789246

– Muhammad Qobidl 'Ainul Arif

Peristiwa politik penting menyita perhatian dunia di awal tahun 2025 ini. Kementerian Luar Negeri Brasil mengumumkan telah diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS mulai tanggal 6 Januari 2025 (Ministério das Relações Exteriores, 2025).

Dalam siaran persnya, Kementerian Luar Negeri Brasil menyebutkan bahwa pengumuman tersebut sejalan dengan pelaksanaan keketuaan Brasil yang berlangsung efektif mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Hanya dalam hitungan hari, Pemerintah Brasil telah sukses menjalankan amanah KTT BRICS, terutama merujuk keputusan KTT Johannesburg tahun 2023, dimana waktu itu pencalonan keanggotaan

Indonesia telah disetujui melalui konsensus oleh semua negara anggota. Terungkap fakta bahwa Pemerintah Indonesia selama ini memang menunggu momentum yang tepat untuk bergabung secara resmi dengan BRICS, yakni selepas transisi kepemimpinan nasional pada tahun 2024

Boleh dikata, bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok BRICS merupakan gebrakan politik luar negeri Indonesia era Prabowo yang belum genap 100 hari masa kerja. Diksi “gebrakan” sengaja dipilih untuk menggambarkan adanya efek kejut (*surprise*) dari suatu kebijakan politik. Karena memang, keterkejutan tersebut juga dirasakan oleh media massa di Rusia yang menyebut bahwa Indonesia secara “tiba-tiba” bergabung dengan BRICS (dzen.ru, 2025). Melalui siaran persnya, Kementerian Luar Negeri Rusia pada tanggal 27 Desember 2024 mengumumkan bahwa Indonesia bersama Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Malaysia, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan disebut akan bergabung menjadi negara mitra BRICS mulai tanggal 1 Januari 2025 (**Министерство иностранных дел Российской Федерации**, 2024). Namun faktanya, Indonesia justru telah menjadi anggota penuh BRICS pada tanggal tanggal 6 Januari 2025.

Keterkejutan memang hanya akan dirasakan oleh publik yang tidak terlibat langsung di dalam proses negosiasi dan diplomasi. Meskipun saat ini dunia diplomasi telah memasuki masa *open diplomacy*, namun tetap saja aspek-aspek yang bersifat teknis dan detail hanya diketahui oleh para diplomat yang “berlaga” di lapangan. Dalam konteks bergabungnya Indonesia ke BRICS, publik hanya mengetahui bahwa proses negosiasi telah berlangsung sejak tahun 2023. Melalui siaran persnya, Kementerian Luar Negeri RI menyebut secara eksplisit adanya dukungan dan fasilitasi yang diberikan oleh Rusia sebagai Ketua BRICS tahun 2024 dan Afrika Selatan di tahun 2023 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025). Namun, publik tidak mengetahui secara pasti bagaimana materi serta dinamika negosiasi yang terjadi selama dua tahun kebelakang hingga akhirnya Indonesia diterima menjadi anggota penuh BRICS.




Dalam pidatonya saat menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan pada tahun 2023, Presiden Jokowi mengajak negara-negara Global South untuk bersatu memperjuangkan hak-haknya serta menolak diskriminasi perdagangan. Jokowi menegaskan bahwa hilirisasi industri tidak boleh dihalangi demi kemajuan suatu negara (Andri Saubani, 2023). Pidato Jokowi tersebut seolah menjadi ajang “curhat” Indonesia yang pada tahun 2021 terkena kebijakan larangan impor *Crude Palm Oil* (CPO) oleh Uni Eropa, sementara pada tahun berikutnya kalah dari Uni Eropa yang menggugat kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia di “meja hijau” Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia merasa ada kekuatan global yang sedang berusaha menghalangi kemajuan negara-negara berkembang. Mereka ingin terus melanggengkan struktur ekonomi-politik imperialis yang menghasilkan ketimpangan serta ketidakadilan global. Dalam konteks demikian, kehadiran BRICS sangat relevan dengan tantangan eksternal Indonesia. Wajar jika Indonesia lantas menjadikan BRICS sebagai bagian dari strategi resiliensinya, yakni cara untuk beradaptasi dengan luwes di tengah situasi sulit dan tidak menyenangkan yang sedang dihadapinya.

Lantas, apakah dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS berarti Indonesia telah masuk ke dalam kubu anti-Barat bersama China, Rusia, dan Iran? Tak dapat dipungkiri kesan itu pasti ada. Namun, dunia diplomasi tidak bisa dilihat seperti zona peperangan yang membagi lawan dan kawan secara hitam-putih. Negara-negara anggota BRICS seperti Indonesia, India, dan Afrika Selatan memiliki rekor sejarah di masa Perang Dingin sebagai negara non-blok. Dalam praktek diplomasi baru-baru ini pun dunia melihat bagaimana Jokowi bisa diterima dengan hangat oleh Zelenski saat berkunjung ke Ukraina dan dapat diterima dengan baik pula oleh Putin saat berkunjung ke Rusia. Politik luar negeri Indonesia yang bercorak bebas-aktif telah dikenal luas dan difahami dengan baik oleh masyarakat internasional. Dalam hal ini, Duta Besar AS untuk Indonesia menyatakan dengan jelas bahwa Pemerintah AS menghargai keputusan dan posisi Pemerintah Indonesia yang ikut aktif berpartisipasi dalam BRICS (Teguh Firmansyah, 2025).

Tidak ada satu pun negara anggota BRICS yang ingin mendapat sanksi ekonomi dari Barat seperti yang dialami Rusia atau Iran. Namun, kesewenangan Barat dalam menjatuhkan sanksi ekonomi dan memberlakukan aturan-aturan diskriminatif juga merupakan ancaman nyata yang perlu diperhitungkan. Indonesia perlu belajar kepada negara-negara yang masih bisa bertahan (*survive*) di tengah sanksi yang mereka hadapi dan bahkan bergerak bersama untuk melawan hegemoni dan ketidakadilan yang ada.

Dalam banyak kesempatan, Presiden Prabowo menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia di era pemerintahannya akan menganut prinsip politik bertetangga yang baik (*good neighbour policy*) dengan slogan, "seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak." Namun, ia juga menyatakan dengan tegas amanat konstitusi untuk melawan segala macam penjajahan yang ada di muka bumi. Artinya, ketidakadilan tidak bisa didiamkan begitu saja, meski Indonesia tetap berusaha mencari kawan sebanyak-banyaknya.

Indonesia memandang negara-negara Global South, terutama negara Muslim, tidak mendapat posisi yang layak dalam percaturan politik internasional saat ini. Mengutip pidato Prabowo pada Sesi Khusus KTT D-8 di Mesir, Dunia Muslim saat ini sedang tidak dihormati, tidak dipedulikan, dan pada kenyataannya Hak Asasi Manusia tidak diberikan (Barat) untuk negara-negara Muslim. Prabowo mengajak kekuatan dari negara-negara Global South untuk bersatu, tidak berperang sendiri, serta mewaspadaikan politik *divide-et-impera* yang diterapkan kekuatan imperialis (Liputan 6 SCTV, 2024).

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, sejak pertengahan tahun 2024 telah menyatakan bahwa Turkiye pasti akan bergabung menjadi anggota penuh BRICS. Namun hingga kini, proses bergabungnya Turkiye menjadi anggota penuh BRICS itu ternyata masih belum jelas (TV BRICS, 2024). Entah merupakan suatu kebetulan atau tidak, delegasi Turkiye juga merasa tidak terlalu perlu menyimak pidato Prabowo pada Sesi Akhir KTT D-8 sebagaimana potongan videonya yang viral di jagat maya. Padahal, ketika itu Prabowo menyampaikan seruan dengan berapi-api akan pentingnya persatuan dan kerjasama antar kekuatan negara-negara berkembang. "*Let us do what we can! Let us face the reality!*," kata Prabowo. Di tengah sinisme terhadap retorika Indonesia yang mungkin ada, sejarah membuktikan bahwa Indonesia telah memberikan contoh konkret untuk "*do what we can*" dengan bergabung bersama BRICS. Selamat! 

Kehadiran BRICS sangat relevan dengan tantangan eksternal Indonesia. Wajar jika Indonesia lantas menjadikan BRICS sebagai bagian dari strategi resiliensinya, yakni cara untuk beradaptasi dengan luwes di tengah situasi sulit dan tidak menyenangkan yang sedang dihadapinya.

– Muhammad Qobidl 'Ainul Arif

Daftar Rujukan

- Andri Saubani. (2023, August 25). *Jokowi Cuma Pidato di KTT BRICS, Mengapa Indonesia tak Jadi Anggota Sekalian?* Republika Online. <https://news.republika.co.id/berita/rzxsx6409/jokowi-cuma-pidato-di-ktt-brics-mengapa-indonesia-tak-jadi-anggota-sekalian-part3>
- dzen.ru. (2025, January 6). *Важные факты об Индонезии, которая внезапно вступила в БРИКС.* Dzen.ru. <https://dzen.ru/a/Z3v9e2OwHnTzugK9>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025, January 7). *Pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tentang Keanggotaan Indonesia di BRICS.* Kemlu.go.id. <https://kemlu.go.id/berita/ Pernyataan-kementerian-luar-negeri-republik-indonesia-tentang-keanggotaan-indonesia-di-brics?type=publication>
- Liputan 6 SCTV. (2024, December 22). *[FULL] Tegas! Pidato Prabowo di Sesi Khusus KTT D8, Serukan Negara Muslim Bersatu | Liputan 6.* Youtu.be. <https://youtu.be/9VcEleVBWVI?feature=shared>
- Ministério das Relações Exteriores. (2025, January 6). *Ingresso da Indonésia no BRICS.* Ministério Das Relações Exteriores. https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/ingresso-da-indonesia-no-brics
- Министерство иностранных дел Российской Федерации. (2024, December 27). *О государствах-партнерах БРИКС.* <http://www.mid.ru>. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/briks/1989548/
- Teguh Firmansyah. (2025, January 7). *Keanggotaan Indonesia, dan Posisi BRICS di Tengah Bayang-Bayang Sanksi Donald Trump.* Republika Online. <https://news.republika.co.id/berita/sppdq377/keanggotaan-indonesia-dan-posisi-brics-di-tengah-bayangbayang-sanksi-donald-trump-part2>
- TV BRICS. (2024, June 4). *Turkey expresses its desire to become member of BRICS | TV BRICS, 04.06.24.* TV BRICS. https://tvbrics.com/en/news/turkey-expresses-its-desire-to-become-member-of-brics/?sphrase_id=19562
- Wulandari, A. P. J. (n.d.). *Mengenal Resiliensi dalam Ilmu Psikologi.* Psychology. Retrieved January 7, 2025, from <https://psychology.binus.ac.id/2020/03/31/mengenal-resiliensi-dalam-ilmu-psikologi/>

Foto halaman 1: TV BRICS | Foto halaman 2: SETNEG RI



Biografi Penulis

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif



Qobid adalah salah satu penggagas utama berdirinya komunitas akademik the Indonesian Islamic Studies and International Relations Association (Insiera) yang diorkestrasi dalam suatu forum kelompok diskusi terarah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2016. Fokus kajian yang menjadi minat dan perhatiannya adalah metodologi riset berbasis wahyu serta permasalahan sosial-politik masyarakat Muslim di Eropa. Saat ini tengah menyelesaikan studi doktoral di MGIMO (Moscow State Institute of International Relations) University, Republik Federasi Rusia.

The Insiera Insight (In-Insight)

Sebuah media digital yang diterbitkan sebulan sekali, memuat opini para anggota Insiera (The Indonesian Islamic Studies and International Relations Association). In-insight menyajikan analisis tajam terkait fenomena hubungan internasional terkini dari sudut pandang akademik melalui sumber-sumber kajian yang terpercaya, sesuai credo; "Beropini dengan Cerdas dan Bernas." Pemimpin Redaksi: Muhammad Qobidl 'Ainul Arif Redaktur: Rudi Candra, Hasbi Aswar, Prihandono Wibowo, Gustri Eni Putri, Siti Muslikhati, Surwandono, Syaiful Anam, Rizky Hikmawan, Gonda Yumitro. Layouter: Hesti Eka Denata. Distribusi: Fadhlán Nur Hakiem.